

Hasil Penelitian

PERSEPSI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA TERHADAP KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BUM DESA SEKTOR PARIWISATA: STUDI KASUS DESA GUNUNGREJO, KABUPATEN MALANG

(THE COMMUNITY AND VILLAGE GOVERNMENT'S PERCEPTION OF DEVELOPMENT POLICY OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISE IN THE TOURISM SECTOR: A CASE STUDY IN GUNUNGREJO VILLAGE, MALANG REGENCY)

Muhammad Irfan Islami, Khoirul Umam Hasbiy, Dinda Amelia Kusumastuti

Universitas Brawijaya
Jl. Veteran No.10-11 , Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, 65145
Jawa Timur - Indonesia
Email: muhammad.irfan@ub.ac.id

Diterima: 2 November 2023; Direvisi: 19 Oktober 2024; Disetujui: 20 Januari 2025

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya alam, potensi sosial, dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa. Desa Gunungrejo, Kabupaten Malang, dihuni oleh mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani namun di sisi lain memiliki potensi wisata alam. Terdapat potensi perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat desa mengenai sektor mana yang perlu diprioritaskan oleh BUM Desa. Pemerintah Desa telah menetapkan strategi untuk terlebih dahulu memprioritaskan sektor pariwisata untuk menjadi program BUM Desa saat ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi pemerintah dan penduduk desa mengenai kebijakan pengembangan BUM Desa di sektor pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber dipilih dengan metode purposive sampling. Sampling ini mempertimbangkan kepentingan ekonomi informan. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memilih sektor pariwisata untuk menjadi engine of growth baru. Pemerintah desa berencana untuk mengarahkan secara bertahap kegiatan BUM Desa menjadi bentuk ecotourism, yang menggabungkan sektor pertanian dan pariwisata. Penduduk desa pada umumnya taat pada keputusan ini. Namun penduduk yang mayoritas merupakan kelompok tani berharap BUM Desa lebih dapat berkontribusi ke sektor pertanian dalam bentuk membantu mencari mitra usaha untuk akses pasar produk pertanian dan membantu permodalan petani untuk penyediaan pupuk.

Kata kunci: BUM Desa, pemerintah desa, masyarakat desa, pariwisata, pertanian

ABSTRACT

The Village-Owned Enterprises (VOE/BUM Desa) is one of the national government's policies aimed at improving the welfare of rural communities through the management of potentially social and economic resources within the village. Gunungrejo Village, located in Malang Regency, is inhabited by a majority of people working as farmers, but on the other hand, it possesses a potential natural tourism object. There are very likely different perceptions between the village government and the communities regarding which sector should be prioritized by the VOE. The Village Government has established a strategy to prioritize the tourism sector as the current program for the VOE. This research aims to analyze the perceptions of the village government and communities regarding the policy of developing VOE in the tourism sector. This study is qualitative research with a case study approach. Data collection methods include observation, interviews, and documentation. Informants were selected using purposive sampling, considering the economic interests of each respondent. The research shows that the village government has chosen the tourism sector to become a new

engine of growth. The government plans to gradually direct the VOE activities towards the form of ecotourism, which combines the agricultural and tourism sectors. The villagers, in general, comply with this decision. However, the majority of villagers, who are part of the farming community, hope that the VOE can contribute more to the agricultural sector by helping farmers to find business partners for distributing agricultural products and helping farmers with funding for fertilizer provision.

Keywords: Village-Owned Enterprise (BUM Desa), Village government, Village communities, tourism, agriculture

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah usaha yang berbentuk badan hukum yang dimiliki oleh desa, yang didirikan oleh masyarakat desa berdasarkan prinsip-prinsip kemandirian, kegotongroyongan, dan kekeluargaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa mempunyai fungsi sebagai pengelola sumber daya ekonomi desa, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dasar hukum BUM Desa adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PMD) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini merupakan dasar hukum yang mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan pengawasan BUM Desa di Indonesia. Selain itu, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menyebutkan tentang BUM Desa dalam pasal 100 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa BUM Desa dapat didirikan untuk mengelola sumber daya ekonomi desa dan berbentuk badan hukum.

Kedua peraturan tersebut memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat bagi pendirian dan pengelolaan BUM Desa. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan aturan yang mengatur tentang penggunaan anggaran BUM Desa melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Desa. Peraturan ini mengatur tentang penggunaan dana desa termasuk dana yang dialokasikan untuk BUM Desa, sehingga pengelolaan dana BUM Desa dapat dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masih terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah mengenai keberadaan, tujuan, dan manfaat dari BUM Desa. Salah satu permasalahan utama dalam perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah mengenai BUM Desa adalah terkait dengan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai BUM Desa. Banyak masyarakat yang masih kurang memahami apa itu BUM Desa, bagaimana BUM Desa berfungsi, dan apa manfaat yang bisa diperoleh dari BUM Desa. Masyarakat juga masih memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai peran BUM Desa dalam pengembangan ekonomi desa.

Beberapa masyarakat menganggap bahwa BUM Desa hanya menjadi instrumen untuk memperoleh keuntungan semata, sementara beberapa masyarakat lainnya menganggap bahwa BUM Desa adalah sarana untuk mengembangkan potensi ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Di sisi lain, pemerintah memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai BUM Desa dan perannya dalam pengembangan ekonomi desa. Pemerintah melalui aturan-aturan yang ada telah mengatur secara detail tentang pendirian dan pengelolaan BUM Desa, serta memberikan dukungan dan bantuan dalam pengembangan BUM Desa. Namun, meskipun pemerintah telah memberikan dukungan dan bantuan, masih terdapat perbedaan persepsi mengenai manfaat yang bisa diperoleh dari BUM Desa. Beberapa pihak menganggap bahwa BUM Desa tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa, sementara beberapa pihak lainnya meyakini bahwa BUM Desa adalah instrumen yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah mengenai BUM Desa juga terkait dengan masalah pengelolaan dan pengawasan BUM Desa. Masyarakat dan pemerintah memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengelolaan dan pengawasan BUM Desa. Beberapa penelitian terdahulu menemukan fakta bahwa masyarakat desa memiliki persepsi bahwa pengelolaan dan pengawasan BUM Desa masih lemah dan tidak transparan, sehingga tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa (Aeni, 2020; Udhiya et al., 2024). Sementara itu, pemerintah berusaha meningkatkan pengawasan dan pengelolaan BUM Desa melalui program-program pendampingan dan pelatihan bagi pengurus BUM Desa.

Perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah mengenai BUM Desa dapat berpotensi mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan BUM Desa. Jika masyarakat tidak memahami atau tidak mendukung keberadaan BUM Desa, maka akan sulit bagi BUM Desa untuk berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Selain itu, jika terdapat perbedaan pandangan antara masyarakat dan pemerintah mengenai tujuan dan manfaat dari BUM Desa, maka bisa terjadi kesulitan dalam

pengambilan keputusan dan pengelolaan BUM Desa.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah mengenai BUM Desa. Penelitian tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pandangan dan pengalaman masyarakat serta pemerintah dalam hal BUM Desa, sehingga dapat memperkuat kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan BUM Desa. Penelitian juga dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan dan program yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan BUM Desa.

Penelitian juga dapat membantu masyarakat dalam memahami dan mengembangkan BUM Desa dengan lebih baik. Dalam penelitian ini, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran yang berharga tentang pengembangan BUM Desa, sehingga dapat menjadi lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Penelitian dapat menjadi sarana untuk menginformasikan masyarakat mengenai manfaat dan peluang yang bisa diperoleh dari BUM Desa, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pengembangan BUM Desa.

Lebih lanjut, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk: 1) Menganalisis persepsi pemerintah desa mengenai fungsi, strategi BUM Desa, dan peran BUM Desa di Sektor Pariwisata; serta hubungan antara BUM Desa, pemerintah desa, dan masyarakat; dalam rangka memaksimalkan potensi sumber daya yang tersedia di desa untuk meningkatkan kondisi perekonomian desa; dan 2) Menganalisis persepsi penduduk desa mengenai fungsi, strategi BUM Desa, dan peran BUM Desa di Sektor Pariwisata; serta hubungan antara BUM Desa, pemerintah desa, dan masyarakat; dalam rangka memaksimalkan potensi sumber daya yang tersedia di desa untuk meningkatkan kondisi perekonomian desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga yang dibentuk oleh desa untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan usaha yang dimiliki oleh desa. BUM Desa dapat dimiliki oleh desa dalam bentuk unit usaha milik desa (UUMD), kelompok usaha bersama (KUBE), atau koperasi. Pendirian BUM Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meskipun telah diatur dalam undang-undang, masih terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah mengenai BUM Desa, khususnya dalam hal peran dan manfaatnya.

Perbedaan persepsi masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan BUM Desa

dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan BUM Desa dalam meningkatkan perekonomian desa. Dalam literatur, terdapat beberapa pendekatan dan teori yang digunakan untuk membahas perbedaan persepsi masyarakat dan pemerintah terkait BUM Desa. Beberapa diantaranya adalah: *Pertama*, Penentuan Kebijakan Publik. Terdapat beberapa model rasionalitas yang mendasari penentuan pengambilan keputusan kebijakan publik (Dunn, 2017).

Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice*) mengasumsikan bahwa seseorang memaksimalkan utilitas pribadinya. Namun teori ini tidak didasarkan pada teori yang dapat diuji secara empiris. Teori selanjutnya adalah Pilihan Beralasan (*Reasoned Choice*). Menurut teori ini, daripada mengasumsikan bahwa seseorang membuat pilihan untuk memaksimalkan utilitasnya, akan lebih berguna untuk memikirkan tentang pilihan-pilihan yang dapat memaksimalkan utilitasnya dapat berasal dari berbagai alasan (*reasons*). Terdapat 5 jenis pilihan beralasan yaitu: ekonomi, teknis, sosial, hukum, dan substantif. Hal ini mencerminkan bahwa terdapat perbedaan nilai, norma, institusi, aturan yang terkait dengan cara penalaran yang dapat diidentifikasi (*identifiable modes of reasoning*). Hal ini sesuai dengan penelitian ini, karena terdapat banyak pemangku kepentingan yang dapat terdampak oleh kebijakan pemerintahan desa.

Kelima alasan atau rasionalitas tersebut berasosiasi dengan kriteria pengambilan keputusan (*decision criteria*) kebijakan publik. Kriteria pengambilan keputusan ini adalah aturan, prinsip, atau standar eksplisit yang digunakan untuk menjustifikasi pilihan kebijakan. Kriteria pengambilan keputusan ini dapat didasarkan pada: efektifitas, efisiensi, kecukupan (*adequacy*), equity (keadilan), responsivitas (*responsiveness*), dan kelayakan (*appropriateness*).

Kedua, Partisipasi Masyarakat. Konsep partisipasi masyarakat menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan (Farmer, 2015). Konsep partisipasi masyarakat ini juga menjadi dasar dalam pengembangan BUM Desa. Namun, perbedaan persepsi masyarakat dan pemerintah terkait partisipasi masyarakat dapat menjadi hambatan dalam implementasi BUM Desa.

Masyarakat cenderung memiliki persepsi yang berbeda-beda terkait partisipasi mereka dalam pengembangan BUM Desa. Beberapa masyarakat merasa partisipasi mereka diabaikan oleh pemerintah, sementara yang lain merasa partisipasi mereka sudah cukup. Selain itu,

partisipasi masyarakat yang tidak terorganisir atau kurang terarah juga dapat menghambat keberhasilan BUM Desa.

Ketiga, Pengembangan Desa Berbasis Komunitas. Konsep pengembangan desa berbasis komunitas menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan desa. Konsep ini sesuai dengan tujuan pengembangan BUM Desa yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal. Pendekatan ini berarti melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengembangan desa. Masyarakat dilibatkan dalam seluruh tahap pengembangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pengembangan desa. Masyarakat juga dilibatkan dalam pembuatan keputusan, merencanakan program, mengidentifikasi masalah, dan mengevaluasi hasil program yang dilaksanakan. Poin pentingnya adalah pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan hanya sebagai objek atau penerima manfaat pasif (Chambers, 2014).

Pengembangan desa dengan pendekatan ini juga meniscayakan pelibatan semua sektor yang terkait, termasuk sektor pemerintah, swasta, dan non-pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam membangun desa yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Secara keseluruhan, pengembangan desa berbasis komunitas adalah suatu pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengembangan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun desa yang lebih berkelanjutan. Dengan partisipasi aktif masyarakat, program-program pengembangan desa dapat lebih tepat sasaran dan lebih berdampak bagi masyarakat.

Keempat, Penelitian Empiris Lain. Terdapat beberapa penelitian lain yang membahas tema penelitian serupa. Partisipasi masyarakat di tahap perencanaan program dapat bersifat perwakilan, di mana masyarakat memberikan masukan kepada pengurus per program dan mereka meneruskannya ke dalam rapat bersama pengurus, pendamping, dan penasehat. (Tiballa, 2017). Penelitian tersebut membahas peran masyarakat dalam pelaksanaan program, pemanfaatan hasil, dan evaluasi program BUM Desa di Swarga Bara, Kabupaten Kutai Timur.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakseragaman tingkat partisipasi masyarakat dalam menjalankan program BUM Desa disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam melaksanakan program tersebut. Selain itu, kurangnya upaya sosialisasi dari pihak BUM Desa dan pemerintah desa mengenai program-

program BUM Desa menyebabkan masyarakat masih belum terinformasi tentang keberadaan program-program yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al. (2020) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, menemukan bahwa masih terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah mengenai peran dan manfaat BUM Desa. Masyarakat melihat BUM Desa sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian desa dan menciptakan lapangan kerja. Sedangkan pemerintah melihat BUM Desa sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan desa. Penelitian di BUM Desa di Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah disebabkan oleh tingkat pengetahuan yang belum memadai dan pola pikir yang belum terbuka dalam hal membuat usaha kelompok (Edy et al., 2016).

Penelitian di Desa Jaya Tirta, Kabupaten Bojonegoro, juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat bersifat perwakilan dalam musyawarah desa (Rismanita and Pradana, 2022). Pendelegasian ini berada di tingkat musyawarah RT dan hasilnya kemudian dikemukakan oleh perwakilan ke tingkat musyawarah desa. Di tingkat musyawarah RT pun ditemukan fakta bahwa masyarakat tidak berani untuk menyampaikan pendapatnya untuk BUM Desa Jaya Tirta meskipun telah diadakan sesi tanya jawab tersendiri. Di sini penulis menyimpulkan bahwa dalam musyawarah, warga tidak berani mengambil keberanian menyampaikan aspirasi, kurangnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan BUM Desa, dan bersifat tidak acuh.

Penelitian lain mencoba mencari tahu apa saja determinan dari tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian di Desa Bilariase, Kabupaten Sidenreng Rappang, menemukan bahwa manajemen pengelolaan BUM Desa berpengaruh kepada tingkat partisipasi masyarakat (Ibrahim et al., 2020), meskipun tidak dijelaskan secara detail batasan manajemen pengelolaan ini dan bagaimana kaitannya dengan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menjelaskan konsep dasar manajemen seperti: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan motivasi.

Beberapa penelitian di atas telah berupaya mendeskripsikan partisipasi masyarakat di desa. Namun belum ada penelitian yang secara spesifik mendeskripsikan perbedaan persepsi antara masyarakat desa dan pemerintah desa mengenai jenis usaha apa yang sebaiknya dipilih oleh BUM Desa. Hal ini merupakan kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan oleh penelitian ini.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Creswell, 2007). Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus adalah salah satu metode penelitian yang digunakan dalam ilmu sosial, khususnya dalam memahami dan menggali fenomena sosial yang kompleks dan mendalam. Metode ini cocok digunakan dalam penelitian yang berfokus pada objek yang spesifik, seperti organisasi atau individu. Dalam metode ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data yang mendalam dan detail. Proses penelitian secara keseluruhan berlangsung sejak Juli-November 2023, sedangkan pengumpulan data di lapangan berlangsung pada 7-23 Oktober 2023.

Berikut adalah tahapan dalam melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus: *Pertama*, Menentukan Objek Penelitian. Objek penelitian pada metode ini harus spesifik dan terfokus. Peneliti harus memilih objek penelitian yang memiliki peran penting dalam penelitian dan memiliki potensi untuk menghasilkan data yang banyak dan berkualitas. Objek dalam penelitian ini adalah persepsi Masyarakat dan Pemerintah Desa terhadap Kebijakan Pengembangan BUMDes Sektor Pariwisata.

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Teknik sampling yang dilakukan dalam pemilihan informan adalah purposive sampling (Sugiyono, 2019) dengan tujuan mendapatkan informasi dari berbagai tokoh-tokoh penting dari pihak pemerintah dan masyarakat desa yang berbeda dalam latar belakang kepentingan ekonominya.

Kedua, Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2019). Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian dan lingkungannya. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan terkait dengan objek penelitian kepada informan yang terkait. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen atau data-data terkait dengan objek penelitian.

Pada penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, peneliti harus memperhatikan beberapa hal, seperti validitas data, keakuratan data, dan kredibilitas data (Sekaran and Bougie, 2009). Validitas data dapat dijaga dengan melakukan pengamatan yang teliti, mengajukan pertanyaan yang relevan dalam wawancara, dan memilih dokumen atau data yang akurat. Keakuratan data dapat dijaga

dengan memeriksa kembali data dan melakukan konfirmasi terhadap informasi yang diberikan oleh informan. Sedangkan kredibilitas data dapat dijaga dengan memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan fenomena sosial yang sedang diteliti.

Tabel 1. Narasumber Penelitian

No.	Jenis Informan
Pemerintah	
1	Kepala Desa
2	Kasi Kesejahteraan atau yang terkait
3	Pengurus BUM Desa
Masyarakat	
1	Tokoh Masyarakat Sektor Pertanian
2	Tokoh Masyarakat Sektor Wisata
3	Tokoh Pemuda Sektor Pertanian
4	Tokoh Pemuda Sektor Wisata

Sumber: Peneliti (2023)

Ketiga, Analisis Data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dilakukan dengan cara memperhatikan detail dan mendalam terhadap data yang sudah dikumpulkan. Data dianalisis melalui proses transkripsi, reduksi, klasifikasi, dan interpretasi. Selama proses analisis data, peneliti harus terus mengacu pada tujuan penelitian untuk menghindari bias dan kebingungan.

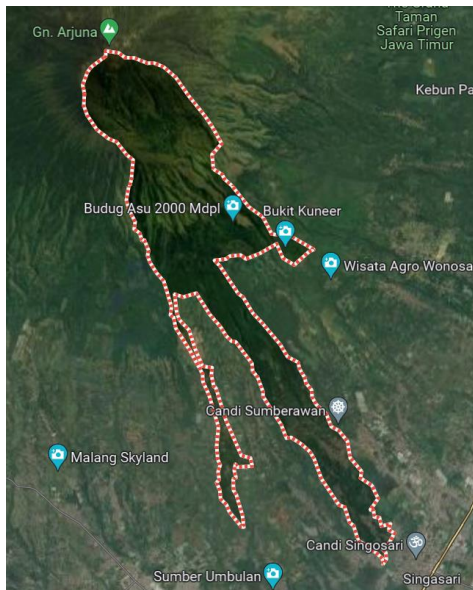
Keempat, Penarikan Kesimpulan. Setelah data dianalisis dan diinterpretasikan, peneliti menarik kesimpulan tentang objek penelitian. Kesimpulan diambil dengan mempertimbangkan data-data yang sudah diperoleh dan mengacu pada tujuan penelitian. Kesimpulan yang diambil harus relevan dengan masalah penelitian dan harus memberikan sumbangan baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Gunungrejo. Desa Gunungrejo pada (112° 52'70"23"T) Bujur Timur dan (8° 22'72"94"S) Lintang Selatan, dengan luas 930 hektar, terletak di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Toyomarto, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Klampok, di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Candirenggo, dan di sebelah barat berbatasan dengan hutan di lereng Gunung Arjuno. Terdapat 9.363 penduduk mendiami desa ini, 4.800 berjenis kelamin laki-laki dan 4.563 merupakan perempuan. Kelompok umur yang dominan di desa ini adalah kelompok umur 40-44 yang berjumlah 791 orang atau setara dengan 8 persen total penduduk (BPS, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, ditemukan bahwa mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani

dengan komoditas utama adalah padi dan sayuran tomat dan bawang. Selainnya menjadi pekerja industri rumahan seperti sandal dan shuttle cock, atau menjadi kuli bangunan.



Gambar 1. Wilayah Desa Gunungrejo
Sumber: google.com/maps (2024)

Profil BUM Desa Gunungrejo.

Berdasarkan informasi dari Sekretaris Desa, BUM Desa pada awalnya didirikan berdasarkan arahan dari Kepala Camat pada tahun 2018, dengan kebijakan tiap desa perlu mendirikan BUM Desa. Pada tahap ini proses pendirian awal baru sekitar pendirian AD/ART dan kepengurusan, melalui wadah musyawarah desa. Komponen masyarakat yang hadir dalam musyawarah ini adalah: ketua lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan perempuan, dan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika). Dari situ dihasilkan Peraturan Desa yang kemudian diperbaharui karena ada perubahan kepengurusan pada tahun 2022.

Berdasarkan sumber dari Kepala Seksi Kesejahteraan Desa, BUM Desa memiliki status berbadan hukum pada tahun 2021. Menurut pengurus BUM Desa, permodalan awal BUM Desa juga top-bottom berasal dari dana Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan komponen APBD yang diwajibkan. Selain itu pada awalnya, unit usaha BUM Desa berupa toko sembako memanfaatkan adanya dana Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) bagi masyarakat yang berhak. Namun karena sifatnya bergantung pada kebijakan pemerintah, unit usaha ini tidak berlanjut.

Pemilihan fokus unit usaha di sektor pariwisata merupakan hasil diskusi dengan

akademisi dengan Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang, pada tahun 2019. Hasil diskusi tersebut menyimpulkan bahwa desa ini memiliki potensi alam yang bagus yang bisa dimaksimalkan untuk kegiatan ekonomi. Dari situ tim melakukan cek lapangan dan memilih lokasi kebetulan tanah kas desa (tanah bengkok). Namun hasil diskusi ini tidaklah secara sempurna membahas dari tahap pembangunan sampai dengan operasional objek wisata ini.



Gambar 2. Objek Wisata Kedok Ombo
Sumber: malangposcomedia.id (2024)

Pada tahun 2021, akademisi Institut Teknologi Negeri (ITN) Malang hadir di desa. Dengan latar belakang disiplin ilmu Perencanaan Wilayah Kota, mereka menghasilkan masterplan pembangunan objek wisata Kedok Ombo, yang menjadi pedoman pembangunan yang masih dilakukan hingga kini. Pada masa yang akan datang, pemerintah desa berencana mengembangkan unit usaha pariwisata ini tidak hanya kafe seperti sekarang, tetapi juga restoran, kolam ikan, dan wisata edukasi pertanian.

Persepsi Pemerintah Desa mengenai Peran BUM Desa di Sektor Pariwisata.

Menurut Bapak Sekretaris Desa, pemilihan unit kerja di sektor pariwisata merupakan hasil diskusi dengan pihak akademisi dari 2 kampus di Malang. Hal ini sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Malang, "One Village, One Destination", yang menitikberatkan pada sektor pariwisata (ANTARA News, 2022). Pemerintah Desa menganggap bahwa sektor pariwisata ini menjadi pusat pertumbuhan baru bagi desa. Hal ini sejalan dengan konsep klasik W.A. Lewis mengenai *engine of growth* (Diao, McMillan and Rodrik, 2019).

Direktur BUM Desa mengaku bahwa mereka ingin meneladani konsep BUM Desa di Pujon Kidul yang berkembang hingga memiliki 10 unit usaha (Kanal desa.com, 2021) yang mempunyai konsep pariwisata serupa. Selain itu, menurut Pemerintah Desa, unit usaha ini bisa memberikan

dampak keterkaitan aktivitas ekonomi (backward and forward linkage) dengan usaha lain. Misalnya restoran, berkaitan dengan unit usaha kolam ikan. Jika permintaan terhadap ikan semakin tinggi seiring semakin ramai pelanggan restoran, permintaan ini dapat dipenuhi oleh budidaya ikan oleh masyarakat. Usaha ini cocok disebabkan keadaan alam di desa yang memiliki sumber air yang melimpah. Selain itu jika terus berkembang, produk ikan dapat diolah menjadi produk kripik ikan atau abon.

Selain itu, objek wisata ini di masa depan akan diarahkan ke konsep edufarm, sehingga masyarakat dari sektor pertanian dapat dilibatkan. Di sisi lain, peningkatan wisatawan ke objek pariwisata juga akan meningkatkan penghasilan asli desa (PAD) yang kemudian dapat disalurkan lagi ke program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Persepsi Masyarakat Desa mengenai Peran BUM Desa di Sektor Pariwisata. Narasumber di sektor pariwisata diwakili oleh salah satu Tokoh Organisasi Pemuda Desa yang terlibat dalam kegiatan operasional tempat wisata Keduk Ombo. Narasumber setuju dengan kebijakan BUM Desa berfokus pada objek wisata baru ini karena dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata di desa, sebagaimana di desa-desa lain di Kabupaten Malang. Pengunjung pemuda datang untuk menikmati kopi di kafe di objek wisata. Tempat wisata juga disewa untuk reuni dan ulang tahun.

Secara umum mayoritas penduduk di desa ini bermata pencaharian sebagai petani. Ketua Kelompok Tani di salah satu dusun, mengungkapkan bahwa sebenarnya secara pribadi mendukung saja keputusan BUM Desa di sektor pariwisata, meskipun mengaku bahwa kemungkinan BUM Desa akan dapat secara langsung dan cepat membantu petani itu kecil. Selama ini bantuan langsung dari BUM Desa ke kelompok tani pun belum ada.

Pendapat bahwa belum adanya peran BUM Desa ke sektor pertanian juga dikemukakan oleh Tokoh Pemuda Tani di salah satu dusun di desa tersebut. Kelompok tani bahkan tidak dilibatkan saat pendirian BUM Desa. Narasumber mengatakan bahwa bisa jadi dapat berdampak ke petani dengan naiknya harga lahan di sekitar objek wisata. Dari sudut petani, narasumber berharap sebenarnya BUM Desa bisa mendapatkan mitra untuk petani-petani di desa atau dengan kata lain perluasan akses pasar kepada petani. Hal ini sejalan dengan penelitian yang mengungkapkan bahwa kemitraan dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan petani (Rosanti et al., 2020).

Narasumber menjelaskan bahwa petani di daerah kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, telah menerapkan sistem ini. Keuntungan sistem ini ialah, dengan menetapkan harga dari awal, petani bisa memperkirakan biaya perawatan yang akan diterapkan kepada tanaman komoditasnya. Padahal di desa ini, komoditas seperti cabai besar dan kentang, tinggi permintaan dari pasar untuk bermitra. Menurutnya BUM Desa mencari cara untuk mencari mitra untuk petani tanaman ini. Selain itu, menurut narasumber, BUM Desa bisa berperan dalam permodalan pengadaan pupuk, karena saat ini masih menggunakan dana pribadi pengurus kelompok tani.

Meskipun menurut Ketua Kelompok Tani, jika 75 persen saja petani di desa mau mengikuti peraturan dan prosedur (yang dirasa cukup rumit) untuk mendapatkan pupuk dari pemerintah, sebenarnya akses dan ketersediaan pupuk untuk petani terjamin. Tokoh Pemuda Tani ini juga memberikan saran bahwa tanah bengkok yang disewakan sebenarnya pemasukannya dapat dimanfaatkan untuk membantu permodalan di awal untuk pengadaan pupuk.

Pembahasan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 menyebutkan bahwa pengelolaan BUM dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipatif dan prioritas sumber daya lokal. Prioritas sumber daya lokal ini bersesuaian dengan teori pertumbuhan ekonomi dan perdagangan ekonomi Ricardo, di mana alokasi sumber daya sumber daya, produksi, dan perdagangan perlu sesuai dengan keunggulan komparatif suatu perekonomian (Burgstaller, 1986). Menurut teori ini, suatu perekonomian desa, karena adanya sumber daya berlimpah, akan lebih baik untuk meningkatkan kegiatan primernya (pertanian) untuk memenuhi kebutuhan lokal, dan memproduksi surplus yang kemudian dapat diekspor ke daerah lain.

Pandangan yang berlawanan mengecilkan peran pertanian dan mengunggulkan peran sektor industri. Hal ini berkaca dari pengalaman revolusi industri yang membuat negara-negara di kawasan Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang menjadi negara maju (Mercado, 2002). Di dalam sejarah pemikiran perekonomian Indonesia, penekanan terhadap sektor selain pertanian (dalam konteks industri, dapat diasosiasikan dengan sektor pariwisata dalam penelitian ini) juga dinyatakan oleh Soemitro Djojohadikusumo dalam perdebatannya dengan Sjafruddin Prawiranegara (Wie, 2010). Soemitro berpendapat bahwa tidak mungkin terus melakukan spesialisasi di produk pertanian.

Pendapat yang lebih moderat dinyatakan oleh Sjafruddin. Strategi pembangunannya

disebut merupakan transformasi ekonomi bertahap (gradual). Hal ini bermakna bahwa untuk kondisi Indonesia saat itu, pembangunan sektor pertanian perlu didahulukan dan tidak menolak pembangunan industri. Namun sektor industri hanya akan berkelanjutan jika bahan baku dari sektor pertanian sudah cukup. Selain itu penduduk perlu juga menguasai pendidikan manajemen dan teknologi sebelum memasuki industrialisasi yang tergesa-gesa (Wie, 2010). Dalam penelitian ini, dapat diasosiasikan bahwa sektor pariwisata adalah sektor industri yang ingin dimajukan oleh pendapat Soemitro. Namun, sesuai dengan pendapat Sjafruddin, sumber daya manusia di Desa Gunungrejo yang menguasai manajemen sektor pariwisata belum memadai.

Pandangan lebih moderat ini juga dijelaskan dengan teori yang berkembang selanjutnya, *Balanced Agro-Industrial Development Strategy (BAIDS)* (Sutcliffe, 1971) (Illarionova et al., 2019). Terdapat dua proposisi utama dari teori ini, yaitu: 1) peningkatan pendapatan pertanian di atas tingkat subsisten akan melahirkan permintaan untuk produk industri; 2) peningkatan pendapatan di sektor industri sebagai berdampak pada ekspansi produksi pertanian melalui peningkatan permintaan bahan pangan dan input industri yang berasal dari pertanian. Dalam penelitian ini, sektor industri dapat diasosiasikan dengan industri pariwisata. Pendapatan dari sektor pariwisata akan berkelanjutan jika terdapat permintaan jasa pariwisata dari penduduk sekitar yang mayoritas bekerja di sektor pertanian, yang telah berpendapatan di atas tingkat subsisten.).

Upaya prioritas untuk peningkatan pendapatan di sektor pertanian ini dapat dikaitkan dengan teori pengambilan keputusan publik (Dunn, 2017). Rasionalitas ekonomi dapat digunakan untuk justifikasi kebijakan ini karena peningkatan pendapatan petani dapat menstabilkan dan meningkatkan perekonomian lokal, dengan fakta bahwa sektor pertanian adalah aktivitas ekonomi utama masyarakat desa. Begitu pendapatan petani meningkat, permintaan dan penawaran (terdiversifikasi) terhadap sektor pariwisata di desa dapat tumbuh. Rasionalitas sosial dapat digunakan untuk justifikasi pula karena mendukung sektor mata pencaharian utama di desa tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan komunitas desa.

KESIMPULAN

BUM Desa Gunungrejo didirikan dengan insiatif yang lebih *top-bottom*, seiring dengan arahan dari Kepala Kecamatan. Pemerintah desa ini memilih sektor pariwisata untuk menjadi

engine of growth baru dari desa, berdasarkan konsultasi dengan akademisi beberapa kampus dan terinspirasi dari kisah sukses BUM Desa di Pujon Kidul. Seiring majunya sektor pariwisata, di masa depan objek wisata ini akan diintegrasikan dengan konsep wisata *edupark* dan restoran-kolam ikan yang bahan bakunya dan tenaga kerjanya juga melibatkan para petani. Penduduk desa terbagi persepsinya atas kebijakan mendahulukan sektor pariwisata menjadi. Tokoh organisasi pemuda yang terlibat di dalam operasional objek pariwisata turut mendukung kebijakan ini karena akan meningkatkan jumlah wisatawan ke desa. Sedangkan penduduk yang bermata pencaharian petani pada dasarnya setuju atas kebijakan ini jika hanya sebagai awalan pendirian BUM Desa. Mereka berharap jika BUM Desa akan berkontribusi secara langsung pula ke kelompok tani dengan membantu mencari mitra pembeli agar petani dapat memperkirakan dari awal biaya dan penerimaan perawatan komoditas pertaniannya. Selain itu mereka berharap BUM Desa juga turut membantu permodalan di awal dalam hal penyediaan pupuk sebelum masa panen.

REKOMENDASI

Inisiatif yang lebih bersifat *top-bottom* dapat diamati dalam pendirian dan pengelolaan awal BUM Desa Gunungrejo. Hal ini merupakan contoh refleksi dari penerapan kebijakan pemerintah pusat tentang BUM Desa. Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan kajian yang lebih spesifik mengenai potensi desa dan kualitas sumber daya masyarakat desa agar BUM Desa yang didirikan benar-benar menggambarkan *comparative advantage* dari suatu desa. Selain itu, supaya BUM Desa dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa, penelitian ini memberikan rekomendasi:

1. Pada tahap pendirian BUM Desa, prinsip partisipatif perlu ditaati oleh para pemangku kebijakan. Koordinasi dengan semua komponen dan kepentingan di desa akan menjadi tantangan dalam musyawarah desa, namun setidaknya jika prinsip partisipasi telah dilaksanakan, maka keputusan yang dihasilkan lebih berorientasi *bottom-up*
2. Pendirian dan pengembangan BUM Desa perlu menerapkan prinsip prioritas sumber daya lokal, sehingga tidak meninggalkan kepentingan mayoritas penduduk yang merupakan petani.
3. Perlu memprioritaskan alokasi sumber daya desa baik berupa PAD maupun Dana Desa ke pengembangan BUM Desa *eco-tourism* agar

masyarakat desa yang mayoritas petani dapat mendapatkan manfaat.

4. BUM Desa ke depan perlu juga membantu sektor pertanian dalam bentuk memenuhi kebutuhan petani berupa membantu pencarian mitra untuk pemasaran produk pertanian dan membantu permodalan untuk penyediaan pupuk di awal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Badan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerja Sama (BPPM) Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya dan tim sehingga penelitian ini terselenggara pada tahun 2023. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada tim Dosen D3 Keuangan dan Perbankan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya atas dukungan moral dan tenaganya.

DAFTAR PUSTAKA

ANTARA News, 2022. *One Village One Destination tingkatkan potensi pariwisata Malang - ANTARA News*. [Online] Dari: <https://www.antaranews.com/berita/3272125/one-village-one-destination-tingkatkan-potensi-pariwisata-malang> [Diakses: 28 Oktober 2023].

BPS, 2023. *Kecamatan Singosari Dalam Angka 2023*.

Burgstaller, A., 1986. Unifying Ricardo's Theories of Growth and Comparative Advantage. *Economica*, 53(212). Available at: <https://doi.org/10.2307/2554097>.

Chambers, R., 2014. *Rural development: Putting the last first*. Routledge.

Creighton, J.L., 2005. The public participation handbook: Making Better Decisions Through Citizen Involvement'. *Jossey-Bass A Wiley Imprint* [Preprint].

Creswell, J.W., 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design: choosing among five approaches*. Sage Publications, Inc.

Dunn, W.N., 2015. *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge.

Edy, Y.A. *et al.*, 2016. Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes). *JDEB*, 13(1).

Ibrahim, M. *et al.*, 2020. Pengaruh Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *Movere Journal*, 2(2). Available at: <https://doi.org/10.53654/mv.v2i2.118>.

Illarionova, E., Samarina, V. and Glekov, P., 2019, June. Economic security as a factor in the balanced development of an agro-industrial region (on the example of Belgorod region). In *Volgograd State University International Scientific Conference: Competitive, Sustainable and Safe Development of the Regional Economy (CSSDRE 2019)* (pp. 230-234). Atlantis Press.

Kanaldesa.com, 2021. *Pujon Kidul: pendapatan desa melonjak melalui BUMDes - KanalDesa.com*. [Online] Dari: <https://kanaldesa.com/artikel/pujon-kidul-pendapatan-desa-melonjak-melalui-bumdes> [Diakses: 30 Oktober 2023].

Lewis, W.A., 1954. Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. *The Manchester School*, 22(2), pages: 139-191. Available at: <https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x>.

Mercado, R.G., 2002. Regional Development in the Philippines: A Review of Experience, State of the Art and Agenda for Research and Action. *Philippine Institute for Development Studies*.

Prawiranegara, S., 1987. Recollections Of My Career. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 23(3). Available at: <https://doi.org/10.1080/00074918712331335281>.

Rismanita, E. and Pradana, G.W., 2022. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Jaya Tirta Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Publika*. Available at: <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p149-158>.

Rosanti, N. *et al.*, 2020. Dampak Contract Farming terhadap Kinerja Usahatani Kopi di Lampung. *AGRIEKONOMIKA*, 9(2). Available at: <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v9i2.8789>.

Sekaran, U. and Bougie, R., 2009. Research Method for Business Textbook: A Skill Building Approach. *John Wiley & Sons Ltd*.

Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kebijakan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi*. 2nd edn. Bandung: Alfabeta.

Sutcliffe, R.B., 1971. *Industry and Underdevelopment*. London: Addison-Wesley Publishing Company.

Tiballa, R., 2017. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program badan usaha milik desa (BUMDES) di desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Universitas Mulawarman*. <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site>.

Universitas Brawijaya, 2020. *Rencana Induk Penelitian Universitas Brawijaya*.

Wie, T.K., 2010. The Debate on Economic Policy in Newly-independent Indonesia between Sjafruddin Prawiranegara and Sumitro Djojohadikusumo. *Itinerario*, 34(1). Available at: <https://doi.org/10.1017/S0165115310000045>.

Diao, X., McMillan, M. and Rodrik, D., 2019. The Recent Growth Boom in Developing Economies: A Structural-Change Perspective. in *The Palgrave Handbook of Development Economics: Critical Reflections on Globalisation and Development*. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14000-7_9.